

**PERAN DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA
BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK (DP2KBP3A) DALAM PENURUNAN
PREVALENSI STUNTING DI KABUPATEN PANGKAJENE DAN
KEPULAUAN PROVINSI SULAWESI SELATAN**

Muhammad Agil Mubarak
NPP 32.0899

*Asdaf Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Provinsi Sulawesi Selatan
Program Studi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil*

Email: agilmubarak13@gmail.com

Pembimbing Skripsi: Dr. Ir. I Gede Suratha, MMA

ABSTRACT

Problem/Background (GAP): Stunting is a serious public health issue that hinders the optimal growth and development of children. Pangkajene and Islands Regency is one of the regions with the highest stunting prevalence in South Sulawesi Province. **Purpose:** This study aims to examine the role of the Office of Population Control, Family Planning, Women's Empowerment, and Child Protection (DP2KBP3A) in efforts to reduce stunting prevalence in Pangkajene and Islands Regency, South Sulawesi Province. **Method:** This research employs a qualitative method with a descriptive and inductive approach. Data were collected through interviews, observations, and document studies involving informants such as DP2KBP3A officials, community cadres, and affected residents. **Results/Findings:** The study found that DP2KBP3A has carried out its role through policy references, a clear understanding of its duties, and the implementation of programs. However, several challenges were encountered, including limited resources, low public awareness, poor community welfare, and difficult access to remote areas. To overcome these issues, DP2KBP3A has undertaken various efforts, such as strengthening internal resources and inter-sectoral coordination, enhancing public education, providing social and economic interventions for at-risk families, and addressing geographic accessibility barriers. **Conclusion:** Despite various challenges, DP2KBP3A continues to play a strategic role in reducing stunting prevalence. This role can be further optimized through increased resource capacity and cross-sectoral collaboration to sustainably achieve stunting reduction targets. **Keywords:** Role, DP2KBP3A, Stunting, Pangkajene and Islands Regency.

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Stunting merupakan salah satu masalah serius di bidang kesehatan yang dapat menghambat pertumbuhan dan perkembangan anak secara optimal. Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan menjadi salah satu daerah dengan angka *stunting* tertinggi di provinsi Sulawesi Selatan. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) dalam upaya penurunan prevalensi *stunting* di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Provinsi Sulawesi Selatan. **Metode:** Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif dan pendekatan induktif. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi terhadap informan yang terdiri dari pejabat DP2KBP3A, kader masyarakat, dan masyarakat terdampak. **Hasil/Temuan:** Penelitian ini menemukan bahwa DP2KBP3A telah menjalankan perannya melalui rujukan kebijakan, pemahaman tugas, dan pelaksanaan program. Namun, pelaksanaan program menghadapi hambatan seperti keterbatasan sumber daya, rendahnya pemahaman masyarakat, tingkat kesejahteraan yang rendah, serta sulitnya akses ke wilayah terpencil. Untuk mengatasi hal tersebut, DP2KBP3A melakukan berbagai upaya seperti penguatan sumber daya serta koordinasi lintas sektor, peningkatan edukasi, intervensi sosial dan ekonomi bagi keluarga beresiko dan mengatasi hambatan geografis. **Kesimpulan:** Meskipun menghadapi berbagai tantangan, DP2KBP3A tetap mampu menjalankan peran strategisnya dalam upaya penurunan *stunting*. Peran tersebut dapat terus dioptimalkan melalui peningkatan kapasitas sumber daya dan kolaborasi lintas sektor guna mencapai target penurunan *stunting* secara berkelanjutan.

Kata kunci: Peran, DP2KBP3A, *Stunting*, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pemerintah Indonesia menghadapi tantangan serius dalam penanganan masalah gizi, di mana prevalensi *stunting* pada balita mengalami peningkatan, sementara prevalensi kurus (*wasting*) dan obesitas menunjukkan penurunan (Kemenkes, 2023). Pemerintah Indonesia telah menjadikan penurunan prevalensi *stunting* sebagai prioritas nasional, permasalahan *stunting* adalah salah satu fokus dari pemerintah di bidang Kesehatan, karena *stunting* dapat menjadi ancaman yang berpotensi mempengaruhi potensi bonus demografi yang diperkirakan terjadi di tahun 2030 (BPS, 2023).

Kondisi *stunting* merupakan suatu kekurangan gizi kronis yang signifikan dalam pengembangan fisik dan perkembangan anak. Anak-anak yang mengalami *stunting* biasanya memiliki tinggi badan yang jauh di bawah rata-rata pertumbuhan yang ditentukan oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO). Faktor-faktor seperti gizi buruk, infeksi berulang, serta kurangnya stimulasi psikososial berkontribusi terhadap timbulnya *stunting*. Meski *stunting* utamanya terkait dengan isu nutrisi, namun juga dipengaruhi oleh faktor sosial dan lingkungan yang luas (Fitri et al., 2022).

Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2022 menyimpulkan bahwa prevalensi *stunting* di Indonesia tetap sebagai tantangan besar. Pada tahun 2022, persentase *stunting* di Indonesia mencatat 21,6%, turun dari 24,4% pada tahun sebelumnya. Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan merupakan salah satu kabupaten yang memiliki angka *stunting* yang tertinggi di provinsi Sulawesi Selatan dengan persentase sebesar 34,2%. Angka tersebut masih jauh dari target nasional yang menargetkan di angka 14% pada tahun 2024. Lebih lagi, angka tersebut juga belum sesuai dengan standar WHO yang menargetkan prevalensi *stunting* harus di bawah 20%. Data ini menunjukkan bahwa meskipun upaya reduksi *stunting* mulai memberikan hasil positif, masih ada tantangan nyata untuk mencapai target yang lebih rendah yang membutuhkan perhatian dan intervensi yang lebih intensif (Kemenkes, 2022).

Untuk mencapai target tersebut, peran pemerintah daerah sangat penting, khususnya melalui instansi teknis seperti Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A). Dinas ini memiliki tanggung jawab langsung dalam mendukung edukasi, pelayanan keluarga berencana, serta perlindungan anak dan perempuan yang semuanya berkaitan erat dengan upaya penurunan *stunting*.

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Masalah *stunting* di Indonesia sudah menjadi perhatian utama pemerintah pusat. Banyak kebijakan telah dikeluarkan untuk menurunkan angka *stunting*, termasuk Perpres Nomor 72 Tahun 2021. Namun, pelaksanaan kebijakan ini di daerah sering kali tidak berjalan baik. Setiap daerah memiliki kondisi dan tantangan yang berbeda, terutama di wilayah seperti Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan yang terdiri dari banyak pulau dan daerah terpencil.

Selama ini, sebagian besar penelitian tentang *stunting* lebih banyak membahas aspek kesehatan, seperti gizi, imunisasi, dan pelayanan posyandu. Padahal, penanganan *stunting* juga melibatkan instansi lain, salah satunya adalah Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A). Dinas ini memiliki peran penting dalam mendampingi keluarga, menyebarkan informasi, serta menjalankan program KB dan perlindungan anak. Namun, belum banyak penelitian yang secara khusus membahas peran DP2KBP3A dalam menurunkan *stunting*.

Selain itu, penelitian tentang peran pemerintah daerah dalam penurunan *stunting* umumnya dilakukan di wilayah perkotaan atau daerah dengan akses layanan yang mudah. Sementara itu, daerah seperti Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan yang memiliki banyak tantangan geografis belum banyak dikaji. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan dalam penelitian yang ada, baik dari sisi lembaga yang dikaji atau wilayah yang menjadi fokus.

Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk melihat lebih jauh bagaimana peran DP2KBP3A dalam menurunkan angka *stunting*, terutama di daerah yang memiliki banyak tantangan seperti Pangkep. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan untuk perbaikan program di daerah lain yang memiliki kondisi serupa.

1.3. Penelitian Terdahulu

Dalam menyusun penelitian ini, peneliti membutuhkan informasi yang diperoleh dengan mengkaji penelitian-penelitian sebelumnya. Kajian terhadap penelitian terdahulu memegang peranan penting dalam proses penelitian karena dapat membantu peneliti mendapatkan pemahaman yang lebih menyeluruh mengenai topik yang akan diteliti serta memperluas wawasan terkait subjek penelitian. Dalam penelitian yang berjudul "Peran Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) dalam Penurunan Prevalensi *Stunting* di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Provinsi Sulawesi Selatan", sangat penting untuk meninjau beberapa penelitian relevan yang telah dilakukan sebelumnya. Oleh sebab itu, penulis telah memilih dan mengidentifikasi beberapa penelitian terdahulu yang akan digunakan sebagai referensi dan bahan perbandingan dalam penelitian ini.

Penelitian oleh Hayati Sofia Salmo, Donald K. Moninjta, Neni Kumayas (2022) dengan judul Strategi Pemerintah Dalam Mengatasi *Stunting* Di Kabupaten Kepulauan Sangihe (Studi Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Sangihe), Penelitian ini berfokus pada strategi pemerintah dalam mengatasi *stunting* di Kabupaten Kepulauan Sangihe, dengan penekanan pada peran Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi pemerintah dalam pengentasan *stunting* di Kabupaten Kepulauan Sangihe sudah menunjukkan hasil yang baik, dengan data dari Dinas Kesehatan menunjukkan penurunan angka *stunting* setiap tahunnya. Keterlibatan pemimpin di berbagai level pemerintahan, mulai dari kecamatan hingga desa, perlu ditingkatkan untuk memastikan keberhasilan program yang ada.

Penelitian oleh Muhammad Afif Nasution (2023) dengan judul Kinerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Dalam Penekanan Angka *Stunting* di Kabupaten Asahan Provinsi Sumatera Utara, Hasil Penelitian menunjukkan Kinerja DP2KBP3A memberikan kemajuan yang baik dalam penanganan *stunting*, dengan penurunan angka *stunting* dari 28,6% pada tahun 2021 menjadi 12% pada tahun 2022. Adapun fokus utama kinerja mencakup produktivitas, kualitas layanan, dan tanggung jawab. Meskipun ada kemajuan, masih terdapat tantangan dalam meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya penanganan *stunting*.

Penelitian oleh Anggraini, Ahmad Yamin, dan Geatriana Dewi (2024) dengan judul Implementasi Kebijakan dan Program Percepatan Penurunan *Stunting* pada Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) Kabupaten Sumbawa. Penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan penurunan *stunting* di DP2KBP3A berjalan dengan baik. Hal ini terlihat dari aspek komunikasi yang efektif dalam sosialisasi program, serta kejelasan informasi yang disampaikan kepada masyarakat. Meskipun ada kekurangan dalam jumlah sumber daya manusia, kompetensi staf yang ada sudah cukup memadai untuk menjalankan tugas mereka.

Penelitian oleh Rahmi Fitri J, Najla Huljannah, Thinni Nurul Rochmah (2022) dengan judul Program Pencegahan *Stunting* di Indonesia: A Systematic Review. Hasil penelitian menunjukkan bahwa didapatkan pencegahan *stunting* yang efektif dapat dilakukan dengan cara pemberian edukasi gizi pada pihak yang berpengaruh (kader, ibu balita, ibu hamil dan calon ibu), pembentukan kelompok belajar untuk ibu balita, dan pemberian makanan tambahan untuk balita. Program atau intervensi yang dilakukan untuk pencegahan *stunting* harus memperhatikan dengan baik aspek masukan dan prosesnya agar mendapatkan keluaran yang optimal, serta harus melibatkan semua pihak mulai dari ibu balita hingga lintas sektoral.

Penelitian oleh I Dewa Nyoman Supriasa dan Heni Purwaningsih (2019) dengan judul Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kejadian *Stunting* pada Balita di Kabupaten Malang. Hasil penelitian di tiga desa di Kabupaten Malang menunjukkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi *stunting* meliputi pengetahuan gizi ibu (60% baik), pola asuh yang kurang tepat, ketahanan pangan keluarga yang rendah (76% rawan pangan), serta rendahnya pendapatan keluarga (96% di bawah UMR). Meskipun pelayanan kesehatan seperti pemberian tablet tambah darah mencapai 98%, konsumsi ibu tetap rendah. Akses terhadap air bersih memadai (98% dari PDAM), namun sanitasi rumah belum sepenuhnya memadai (11% belum cukup). Sosial budaya juga berperan,

dengan 13% keluarga memiliki pantangan makanan tertentu saat hamil dan menyusui. Selain itu, sebagian besar balita diasuh oleh ibu (76%), sementara 24% lainnya diasuh oleh nenek atau saudara. Semua faktor ini saling berkaitan dan memperburuk masalah *stunting* di daerah tersebut.

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penelitian ini memiliki kebaruan karena mengkaji secara khusus bagaimana peran Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) dalam menurunkan angka *stunting* di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dengan menggunakan teori peran dari Levinson.

Berbeda dari penelitian sebelumnya yang umumnya menggunakan teori kinerja atau implementasi kebijakan, penelitian ini melihat peran dinas dari tiga sisi, yaitu sebagai aturan, sebagai pemahaman (konsep), dan sebagai tindakan nyata di lapangan. Selain itu, penelitian ini juga menyoroti tantangan khusus di wilayah kepulauan seperti akses wilayah yang sulit dan rendahnya pemahaman masyarakat tentang gizi. Dengan fokus tersebut, penelitian ini memberikan sudut pandang baru dalam melihat peran pemerintah daerah dalam penanganan *stunting*, terutama di daerah yang memiliki kondisi geografis dan sosial yang kompleks.

1.5. Tujuan

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami secara mendalam bagaimana peran Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) dalam menurunkan angka *stunting* di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi berbagai factor penghambat yang dihadapi dinas tersebut dalam menjalankan tugasnya. Selain itu, penelitian ini ingin mengetahui upaya-upaya yang telah dilakukan oleh DP2KBP3A untuk mengatasi hambatan tersebut agar program penurunan *stunting* dapat berjalan secara optimal dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

II. METODE

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan penelitian kualitatif deskriptif. Metode penelitian kualitatif lebih cocok digunakan apabila permasalahan dalam situasi sosial masih remang-remang, kompleks, dinamis, atau peneliti bermaksud memahami situasi sosial secara lebih mendalam dan juga menemukan hipotesis atau teori (Sugiyono, 2013). Bungin (2007) menjelaskan jika penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif juga bertujuan untuk memberi gambaran, meringkaskan berbagai kondisi, berbagai situasi, atau fenomena realita sosial yang ada di masyarakat yang menjadi objek penelitian, dan berupaya menarik realita itu ke permukaan sebagai suatu ciri, karakter, sifat, model, gambaran atau kondisi, situasi, tanda, dan fenomena tertentu.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui observasi dan wawancara langsung dengan pihak Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kader IMP, serta masyarakat. Sementara itu, data sekunder dikumpulkan melalui laporan kegiatan dan dokumen yang telah ada (Kurniawan et al., 2023).

Informan dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling* dan

snowball sampling. Teknik *Purposive sampling* digunakan kepada pihak DP2KBP3A dikarenakan informan tersebut merupakan kriteria tertentu yang dianggap mampu memberikan informasi yang sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh penulis. Teknik *snowball sampling* digunakan kepada pihak Masyarakat yang memiliki anak *stunting* dan kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP), penulis mempertimbangkan kelengkapan data dari informan tersebut akan lebih maksimal apabila diambil dari beberapa orang menggunakan teknik ini. Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Provinsi Sulawesi Selatan selama 23 hari.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Peran Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) dalam Penurunan Prevalensi *Stunting* di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan

3.1.1 Gambaran Penanganan Penurunan Prevalensi *Stunting*

Tabel 3.1
Trend *Stunting* Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan 2021-2024

NO	KECAMATAN	2021		2022		2023		2024	
		Stunting	%	Stunting	%	Stunting	%	Stunting	%
1	PANGKAJENE	305	11,2	277	10,12	295	11,8	225	8,34
2	MINASATE'NE	232	7,9	167	5,55	156	6,2	158	6,19
3	BUNGORO	415	13,4	369	11,59	396	15,8	343	12,34
4	LABAKKANG	448	13,1	432	11,99	347	13,8	357	12,70
5	MA'RANG	379	18,3	356	15,38	338	13,5	308	13,40
6	SEGERI	163	12,2	135	9,89	158	6,3	115	8,29
7	MANDALLE	118	19,6	79	11,37	86	3,4	74	11,06
8	BALOCCI	39	3,9	65	6,62	62	2,4	79	8,47
9	TONDONG TALLASA	156	26,9	129	21,94	106	4,2	67	12,84
10	LK TUPABBIRING	151	11,7	241	18,95	166	6,6	111	7,04
11	LK TUPABBIRING UTARA	109	10,1	85	7,78	94	3,7	81	6,73
12	LK TANGAYA	168	11,2	148	8,95	195	7,8	137	7,12
13	LK KALMAS	65	6,2	58	4,22	100	4	59	4,40
	KABUPATEN	2748	12,1	2541	10,64	2499	10,59	2114	9,32

Sumber : Hasil survey e-PPGBM DP2KBP3A Kab. Pangkajene dan Kepulauan

Dari tabel 3.1 dapat disimpulkan bahwa pengukuran data terbaru pada bulan Agustus 2024 menunjukkan bahwa prevalensi *stunting* di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan turun di angka 9,32 persen dari 10,59 persen pada tahun 2023 dan tren

penurunan ini terjadi sejak tahun 2021 yang awalnya sebesar 12,1 persen (berdasarkan E-PPGBM). Dalam 4 tahun terakhir *stunting* di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan turun sebesar 2,78 persen. Peran DP2KBP3A menjadi salah satu yang paling penting dalam menurunnya prevalensi *stunting* di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.

3.1.2 Peran Sebagai Norma/Aturan

Berdasarkan hasil wawancara, observasi dan studi dokumentasi dapat dilihat bahwa DP2KBP3A telah menjalankan perannya sebagai norma atau aturan sebagaimana dijelaskan dalam teori peran Levinson. Dalam konteks ini, peran sebagai norma berarti bahwa suatu lembaga atau individu menjalankan tugasnya berdasarkan aturan, pedoman, atau kebijakan yang berlaku dan menjadi acuan formal dalam pelaksanaan fungsi kelembagaan.

DP2KBP3A menjadikan Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2023 sebagai landasan utama dalam pelaksanaan strategi percepatan penurunan *stunting* di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan. Peraturan ini menjadi arah kebijakan yang meringkaskan program-program prioritas yang dijalankan oleh dinas, seperti program pengendalian pertumbuhan penduduk melalui Keluarga Berencana (KB), promosi pengasuhan optimal dalam 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK), serta program Dapur Sehat Atasi *Stunting* (DASHAT) yang menyoal keluarga dengan anak berisiko *stunting*.

Selain itu, DP2KBP3A juga telah menyusun dan menerapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang menjadi panduan teknis bagi pelaksanaan kegiatan di lapangan. SOP ini memastikan bahwa setiap intervensi dilakukan secara sistematis dan sesuai standar. Contohnya, dalam pelaksanaan program KB, terdapat prosedur yang mengatur kriteria sasaran, mekanisme penyuluhan, hingga pemantauan terhadap akseptor. Demikian pula dalam program Bina Keluarga Balita (BKB), SOP digunakan oleh para kader IMP (Institusi Masyarakat Pedesaan) dalam memberikan edukasi terkait pola asuh dan gizi anak agar dilakukan secara terarah dan konsisten.

Kehadiran regulasi formal dan SOP yang terstruktur menunjukkan bahwa DP2KBP3A menjalankan tugas dan fungsinya tidak secara sporadis, melainkan berbasis aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah dan instansi teknis terkait. Hal ini menunjukkan bahwa dimensi **peran sebagai norma/aturan** telah dijalankan secara baik dan konsisten. Dengan kata lain, DP2KBP3A tidak hanya memahami perannya secara administratif, tetapi juga menerapkannya secara teknis-operasional dengan tetap mengacu pada kerangka hukum dan kebijakan yang berlaku. Oleh karena itu, dalam konteks teori peran Levinson, dapat dikatakan bahwa DP2KBP3A telah menginternalisasi dan menjalankan perannya sesuai dengan ekspektasi yang melekat pada institusinya dalam upaya penurunan prevalensi *stunting* di daerah.

3.1.3 Peran Sebagai Suatu Konsep

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Dinas, Kepala Bidang, serta kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) di lingkungan DP2KBP3A Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, dapat disimpulkan bahwa aspek peran sebagai suatu konsep, sebagaimana dijelaskan dalam teori Levinson, telah diinternalisasi dengan cukup baik oleh para pelaksana di tingkat dinas maupun di lapangan. Dalam teori Levinson, peran sebagai konsep merujuk pada bagaimana individu dalam organisasi memahami makna,

tujuan, dan nilai dari tugas yang mereka emban, serta bagaimana pemahaman ini membentuk sikap dan orientasi kerja mereka.

DP2KBP3A memahami bahwa tugas mereka tidak hanya terbatas pada menjalankan program teknis seperti pengendalian penduduk melalui KB, tetapi juga mencakup fungsi strategis dalam membentuk pola pikir masyarakat mengenai pentingnya perencanaan keluarga, pola asuh yang tepat, serta pemenuhan gizi anak yang berkelanjutan. Pernyataan dari Kepala Bidang yang menjelaskan keterkaitan antara kesejahteraan keluarga dan keberhasilan pencegahan *stunting* menunjukkan adanya pemahaman yang mendalam terhadap fungsi kelembagaan mereka dalam upaya jangka panjang membangun sumber daya manusia yang sehat.

Di tingkat pelaksana lapangan, para kader IMP juga menunjukkan pemahaman yang komprehensif terhadap peran mereka. Mereka tidak hanya menjalankan fungsi penyuluhan satu arah, tetapi juga berperan aktif sebagai pendamping yang terlibat langsung dalam perubahan perilaku masyarakat. Pendampingan yang mereka lakukan mencakup edukasi tentang pola makan sehat, kunjungan ke posyandu, hingga motivasi psikologis kepada ibu hamil dan keluarga balita. Hal ini membuktikan bahwa mereka memahami bahwa keberhasilan program bukan hanya ditentukan oleh pelaksanaan kegiatan administratif, tetapi juga oleh transformasi sosial di tingkat keluarga.

Selain itu, visi yang diusung oleh DP2KBP3A, yaitu membentuk keluarga yang sehat, mandiri, dan berkualitas, telah menjadi panduan nilai yang dipahami dan diterapkan dalam aktivitas mereka. Kolaborasi lintas sektor dengan dinas lain seperti Dinas Kesehatan dan Dinas Sosial menunjukkan bahwa DP2KBP3A tidak bekerja secara sektoral, tetapi berupaya untuk mengintegrasikan pendekatan mereka agar hasil program lebih berkelanjutan dan berdampak luas. Para kader juga menyampaikan pemahaman yang selaras, yakni bahwa penurunan *stunting* adalah bagian dari upaya membentuk generasi yang sehat dan siap menghadapi masa depan, bukan sekadar memenuhi indikator jangka pendek.

Dengan demikian, dalam perspektif teori peran Levinson, dapat disimpulkan bahwa DP2KBP3A Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, beserta para kader di lapangan, telah menunjukkan pemahaman yang utuh terhadap peran mereka sebagai suatu konsep. Pemahaman ini terlihat dari sikap mereka dalam melihat tugas tidak semata sebagai kewajiban teknis, tetapi sebagai misi pembangunan sosial yang menysasar perubahan perilaku masyarakat dan peningkatan kualitas hidup keluarga. Inilah yang menjadikan peran mereka bermakna dan efektif dalam konteks penurunan prevalensi *stunting*.

3.1.4 Peran Sebagai Perilaku

Berdasarkan hasil wawancara dengan para pejabat DP2KBP3A, kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP), dan masyarakat penerima manfaat, serta ditinjau dari dokumen kebijakan yang relevan seperti Peraturan Bupati Pangkajene dan Kepulauan Nomor 40 Tahun 2023, dapat disimpulkan bahwa DP2KBP3A Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan telah menjalankan perannya sebagai perilaku secara nyata dan aktif, sebagaimana dijelaskan dalam teori peran Levinson. Dimensi peran sebagai perilaku menekankan bagaimana suatu peran tidak hanya dipahami secara normatif atau konseptual, tetapi juga diimplementasikan secara langsung melalui tindakan, program, dan interaksi konkret dengan masyarakat.

Dalam praktiknya, DP2KBP3A telah melaksanakan berbagai program intervensi yang dirancang secara komprehensif dan berkelanjutan untuk mencegah dan menurunkan angka *stunting*. Program-program tersebut tidak hanya mencakup aspek pengendalian penduduk melalui Keluarga Berencana, tetapi juga mencakup promosi pengasuhan 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK), program Bina Keluarga Balita, Generasi Berencana, pendewasaan usia perkawinan, pembentukan gerakan orang tua asuh, serta sosialisasi program DASHAT (Dapur Sehat Atasi *Stunting*). Program-program tersebut tidak hanya bersifat administratif atau seremonial, tetapi betul-betul menasar perubahan perilaku masyarakat melalui edukasi, pendampingan, dan pemberdayaan keluarga yang berisiko *stunting*.

Selain itu, intervensi spesifik seperti pemberian makanan tambahan untuk ibu hamil KEK dan balita kurang gizi, distribusi tablet tambah darah, promosi ASI eksklusif dan MP-ASI bergizi, serta program "1 Butir Telur 1 Hari" menunjukkan bahwa pelaksanaan program di lapangan dilakukan secara sistematis dan berdasarkan kebutuhan masyarakat. Kegiatan penyuluhan juga dilakukan dengan metode yang interaktif dan kontekstual, memperhatikan budaya lokal dan kondisi sosial masyarakat. Penggunaan media sosial, diskusi kelompok, hingga simulasi memasak makanan bergizi merupakan bentuk adaptasi perilaku pelaksana program agar informasi mudah diterima masyarakat.

Hal lain yang menegaskan peran sebagai perilaku adalah keterlibatan aktif kader IMP dalam mendampingi masyarakat secara langsung. Para kader tidak hanya menyampaikan materi, tetapi juga membangun kepercayaan, mendengarkan keluhan, dan menjadi jembatan antara pemerintah dan masyarakat. Testimoni dari masyarakat penerima manfaat program DASHAT juga menunjukkan bahwa ada dampak nyata yang dirasakan—baik berupa peningkatan pemahaman tentang gizi maupun perubahan pada kondisi anak yang semula mengalami *stunting* menjadi lebih sehat dan aktif.

Lebih jauh, keberhasilan implementasi program ini juga tidak lepas dari kolaborasi lintas sektor. DP2KBP3A tidak bekerja secara parsial, tetapi menjalin kerja sama erat dengan Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, serta tokoh masyarakat dan organisasi lokal. Pendekatan ini menunjukkan bahwa DP2KBP3A tidak hanya bertindak sebagai pelaksana kebijakan, tetapi juga sebagai penggerak perubahan sosial melalui koordinasi, komunikasi, dan keterlibatan masyarakat secara menyeluruh.

Dengan demikian, dalam kerangka teori Levinson, dapat disimpulkan bahwa peran sebagai perilaku telah dijalankan dengan optimal oleh DP2KBP3A Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan. Tindakan nyata yang dilakukan tidak hanya menunjukkan pelaksanaan program secara administratif, tetapi juga mencerminkan komitmen, kepedulian, dan kemampuan adaptif dinas dan para pelaksana lapangan dalam menghadapi tantangan *stunting* secara langsung. Hal ini membuktikan bahwa peran DP2KBP3A bukan hanya formalitas kelembagaan, tetapi telah mewujudkan dalam bentuk aksi konkret yang berdampak pada perbaikan kualitas hidup masyarakat.

3.2 Faktor Penghambat dalam Penurunan Prevalensi *Stunting*

Berdasarkan pada hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti dengan mengkomparasikan hasil observasi, wawancara, dan studi dokumentasi di lapangan, maka peneliti menemukan beberapa faktor penghambat yang mempengaruhi pelaksanaan peran DP2KBP3A dalam penurunan prevalensi *stunting* ialah sebagai berikut:

- 1) Keterbatasan sumber daya, diantaranya keterbatasan anggaran dan**

keterbatasan tenaga penyuluh atau kader di lapangan.

Setiap program membutuhkan dukungan sumber daya yang memadai agar dapat berjalan secara optimal. Namun, dalam praktiknya, keterbatasan anggaran sering kali menjadi kendala utama dalam pelaksanaan program pencegahan dan penurunan *stunting*. Selain itu, tenaga penyuluh dan kader yang bertugas memberikan edukasi kepada masyarakat juga masih kurang, baik dari segi jumlah maupun kapasitasnya. Di beberapa wilayah, kader dan tenaga lapangan harus menangani banyak keluarga sekaligus, sehingga penyampaian informasi tidak selalu bisa dilakukan secara maksimal.

2) Rendahnya pemahaman masyarakat tentang *stunting* juga menjadi faktor yang signifikan.

Selain keterbatasan sumber daya, rendahnya pemahaman masyarakat tentang *stunting* juga menjadi tantangan yang signifikan. Banyak orang tua yang masih menganggap bahwa *stunting* hanyalah masalah tinggi badan, bukan kondisi serius yang dapat berdampak pada perkembangan otak dan kualitas hidup anak di masa depan. Akibatnya, kesadaran untuk mengikuti program-program edukasi dan kesehatan masih rendah.

Partisipasi ayah dalam pengasuhan dan pemenuhan gizi anak juga masih minim. Sosialisasi dan edukasi lebih sering dihadiri oleh ibu, sementara peran laki-laki dalam mendukung gizi keluarga belum menjadi kebiasaan yang umum. Selain itu, masih banyak keluarga yang memiliki pola pikir bahwa makanan sehat harus mahal, sehingga mereka cenderung tidak memprioritaskan konsumsi makanan bergizi dalam keseharian mereka.

3) Tingkat kesejahteraan yang masih rendah terutama terkait dengan kondisi ekonomi.

Kondisi ekonomi yang rendah membuat banyak keluarga kesulitan untuk secara konsisten menyediakan makanan bergizi bagi anak-anak mereka. Bahkan dengan adanya bantuan dari pemerintah, sebagian keluarga masih bergantung pada makanan pokok yang kurang bervariasi dalam hal kandungan nutrisi. Beban kerja ibu yang tinggi juga menjadi faktor lain yang menghambat pemberian ASI eksklusif dan penerapan pola asuh yang ideal bagi anak.

4) Selain persoalan ekonomi, hal lain yang dihadapi dalam upaya penurunan *stunting* adalah keterbatasan akses di daerah terpencil dan kepulauan.

Beberapa wilayah sulit dijangkau oleh petugas karena kondisi geografis, sehingga kegiatan sosialisasi, pembinaan, dan distribusi bantuan menjadi tidak merata. Hal ini berdampak pada keterlambatan intervensi dan terbatasnya informasi yang diterima Masyarakat mengenai pencegahan *stunting*.

3.3 Upaya yang Dilakukan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dalam Mengatasi Faktor Penghambat Untuk Menurunkan Prevalensi *Stunting*

Meskipun menghadapi berbagai faktor penghambat dalam upaya menurunkan prevalensi *stunting*, Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan telah melakukan berbagai upaya untuk mengatasi hambatan tersebut diantaranya :

1) Penguatan Sumber Daya dan Koordinasi Antarinstansi

Untuk mengatasi keterbatasan anggaran dan tenaga penyuluh, DP2KBP3A melakukan berbagai langkah, diantaranya:

- a) Memanfaatkan Dana Desa dan Program Bantuan Pemerintah
- b) Meningkatkan Kapasitas Kader dan Tenaga Penyuluh
- c) Penguatan Koordinasi Lintas Sektor

2) Peningkatan Edukasi dan Kesadaran Masyarakat

Rendahnya pemahaman masyarakat menjadi salah satu penghambat dalam pencegahan *stunting*. Untuk mengatasinya, DP2KBP3A melakukan berbagai upaya edukatif, seperti:

- a) Sosialisasi Intensif Mengenai *Stunting*
- b) Program "Bapak Peduli *Stunting*"
- c) Pemberdayaan Kader IMP dan Tokoh Masyarakat

3) Intervensi Ekonomi dan Dukungan bagi Keluarga Rentan

Untuk mengatasi hambatan ini, DP2KBP3A menerapkan berbagai strategi berbasis intervensi ekonomi dan pemberdayaan keluarga, antara lain:

- a) Penyediaan Makanan Tambahan (PMT) bagi Ibu Hamil dan Balita *Stunting*.
- b) Distribusi Tablet Tambah Darah (TTD) bagi Ibu Hamil dan Remaja Putri.
- c) Program Dapur Sehat Atasi *Stunting* (DASHAT) untuk Ketahanan Pangan Keluarga.
- d) Pemberdayaan Ekonomi bagi Keluarga Berisiko *Stunting* dalam jangka panjang,

4) Upaya Mengatasi Hambatan Aksesibilitas Wilayah Terpencil dan Kepulauan

Menanggapi kondisi tersebut, DP2KBP3A melakukan beberapa strategi untuk tetap menjangkau masyarakat di wilayah tersebut. Salah satunya adalah dengan mengoptimalkan peran kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) yang tinggal di desa-desa sasaran. Selain itu, DP2KBP3A juga menerapkan pendekatan jemput bola melalui layanan keliling yang terintegrasi dengan program-program lintas sektor seperti posyandu keliling, penyuluhan terpadu, serta kunjungan lapangan oleh tim penyuluh dan petugas lapangan KB. Pendekatan ini dilakukan secara terjadwal dan mempertimbangkan faktor cuaca serta akses laut atau darat agar intervensi tetap berjalan.

3.4 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Temuan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa DP2KBP3A Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan telah menjalankan perannya dalam penurunan *stunting* secara menyeluruh, baik dari sisi perencanaan program, edukasi masyarakat, hingga kerja sama lintas sektor. Temuan ini memiliki kesesuaian dan perbedaan tertentu jika dibandingkan dengan penelitian-penelitian sebelumnya.

Sama halnya dengan penelitian Hayati Sofia Salmo, Donald K. Moninjta, dan Neni Kumayas (2022) yang menekankan pentingnya strategi dan keterlibatan pemerintah daerah dalam menurunkan angka *stunting* di Kabupaten Kepulauan Sangihe, penelitian ini juga menunjukkan bahwa peran aktif pemerintah daerah, khususnya DP2KBP3A, sangat berpengaruh dalam pelaksanaan program pencegahan *stunting*. Kedua penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan program dipengaruhi oleh struktur organisasi yang

responsif serta keberpihakan pemimpin daerah terhadap isu *stunting*. Namun, berbeda dengan penelitian tersebut yang menyoroti perlunya peningkatan keterlibatan pemimpin tingkat kecamatan dan desa, penelitian ini menemukan bahwa pelibatan kader lokal di setiap desa sudah berjalan dengan baik dan justru menjadi kekuatan utama dalam menyampaikan program langsung ke masyarakat.

Berbeda dengan penelitian Muhammad Afif Nasution (2023) yang fokus pada aspek kinerja DP2KBP3A di Kabupaten Asahan dengan indikator seperti produktivitas dan kualitas layanan, penelitian ini lebih menekankan pada pelaksanaan peran dalam tiga dimensi teori Levinson: norma, konsep, dan perilaku. Meski sama-sama menunjukkan bahwa DP2KBP3A mampu memberikan dampak positif terhadap penurunan angka *stunting*, penelitian ini memberikan kontribusi tambahan dengan menjelaskan bagaimana pemahaman peran dan interaksi sosial menjadi faktor kunci dalam keberhasilan program di tingkat akar rumput, bukan hanya dari sisi kinerja administratif semata.

Temuan ini juga memperkuat penelitian Anggraini, Ahmad Yamin, dan Geatiana Dewi (2024) yang menyatakan bahwa implementasi kebijakan *stunting* di DP2KBP3A Kabupaten Sumbawa berjalan baik melalui komunikasi yang efektif dan SOP yang jelas. Dalam konteks Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, kejelasan SOP, penyuluhan yang terstruktur, dan kolaborasi lintas sektor juga menjadi elemen utama dalam mendukung keberhasilan program. Namun, temuan dalam penelitian ini memperluas pemahaman dengan menambahkan aspek perilaku kader dan masyarakat yang menunjukkan adanya transformasi pola pikir dan kebiasaan hidup sehat, yang tidak terlalu diulas dalam penelitian sebelumnya.

Sementara itu, penelitian sistematik oleh Rahmi Fitri J., Najla Huljannah, dan Thinni Nurul Rochmah (2022) menyebutkan bahwa pencegahan *stunting* efektif dilakukan melalui edukasi gizi, pembentukan kelompok belajar, dan pemberian makanan tambahan. Temuan dalam penelitian ini mendukung pernyataan tersebut, terutama dalam implementasi program DASHAT, 1 Butir Telur 1 Hari, serta pemberian makanan tambahan dan tablet tambah darah, yang ditujukan untuk ibu hamil KEK dan balita. Penelitian ini juga menemukan bahwa perubahan perilaku masyarakat bukan hanya terjadi karena intervensi fisik, tetapi juga karena pendampingan dan edukasi yang berkelanjutan—hal yang senada dengan temuan Fitri dkk bahwa aspek proses dan pelibatan lintas sektor sangat menentukan efektivitas program.

Lebih lanjut, temuan ini juga selaras dengan penelitian I Dewa Nyoman Supriasa dan Heni Purwaningsih (2019) yang menekankan bahwa *stunting* dipengaruhi oleh pengetahuan gizi ibu, ketahanan pangan keluarga, pola asuh, dan faktor sosial budaya. Penelitian ini memperkuat kesimpulan tersebut, karena banyak intervensi yang dilakukan DP2KBP3A menasar langsung pada edukasi ibu hamil dan ibu balita, pemberdayaan keluarga melalui kader, serta pendekatan berbasis lokal seperti penggunaan bahan makanan yang tersedia di sekitar rumah. Namun, berbeda dari penelitian Supriasa dan Purwaningsih yang berfokus pada analisis faktor penyebab, penelitian ini lebih menitikberatkan pada peran institusi pemerintah dalam merespons dan mengintervensi faktor-faktor tersebut secara terstruktur dan kolaboratif.

Dengan demikian, temuan dalam penelitian ini tidak hanya memperkuat hasil penelitian sebelumnya, tetapi juga memberikan dimensi tambahan dalam pemahaman tentang pentingnya peran yang dijalankan secara utuh—dari aspek kebijakan, pemahaman peran, hingga tindakan nyata—dalam menurunkan angka *stunting* di daerah dengan

tantangan geografis dan sosial yang kompleks seperti Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai peran Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) dalam menurunkan prevalensi *stunting* di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil wawancara, observasi dan studi dokumentasi, penulis menarik kesimpulan bahwa DP2KBP3A telah menunjukkan peran yang baik dalam penurunan prevalensi *stunting* di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan baik dari dimensi sebagai norma/aturan, sebagai suatu konsep maupun sebagai perilaku.
2. Faktor Penghambat dalam Pelaksanaan Peran, adapun hambatan yang ditemukan dalam pelaksanaan peran meliputi:
 - a. Keterbatasan sumber daya, seperti kapasitas penyuluh serta kader di lapangan dan juga keterbatasan anggaran.
 - b. Rendahnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya gizi seimbang dan pola asuh yang benar, serta masih kuatnya pengaruh budaya lama.
 - c. Tingkat kesejahteraan masyarakat yang masih rendah, menyebabkan sebagian keluarga kesulitan memenuhi kebutuhan pangan bergizi secara mandiri, terutama dalam hal pemberian protein hewani dan makanan pendamping ASI yang sesuai standar gizi anak.
 - d. Aksesibilitas wilayah terpencil, yang menyulitkan petugas menjangkau keluarga di daerah kepulauan dan pelosok.
3. Upaya Mengatasi Hambatan, DP2KBP3A melakukan berbagai upaya untuk menghadapi hambatan tersebut, antara lain:
 - a. Penguatan Sumber Daya dan Koordinasi Antarinstansi, dengan memanfaatkan dana desa dan program bantuan pemerintah daerah, meningkatkan kapasitas kader dan tenaga penyuluh, dan penguatan koordinasi lintas sektor.
 - b. Peningkatan Edukasi dan Kesadaran Masyarakat, dengan sosialisasi yang lebih intensif seperti kampanye tentang pentingnya 1.000 hari pertama kehidupan (HPK), mensosialisasikan program “bapak peduli *stunting*”, dan melibatkan tokoh masyarakat.
 - c. Intervensi Ekonomi dan Dukungan bagi Keluarga Rentan, upaya yang dilakukan seperti penyediaan makanan tambahan (PMT) bagi ibu hamil dan balita *stunting*, distribusi tablet tambah darah (TTD) bagi ibu hamil dan remaja putri, program dapur sehat atasi *stunting* (DASHAT), dan pemberdayaan ekonomi bagi keluarga berisiko *stunting*.
 - d. Upaya Mengatasi Hambatan Aksesibilitas Wilayah Terpencil dan Kepulauan, seperti mengoptimalkan peran kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) yang tinggal di desa-desa sasaran dan menerapkan pendekatan jemput bola melalui layanan keliling.

Keterbatasan Penelitian, Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu dicermati. Pertama, penelitian ini hanya difokuskan pada satu instansi, yaitu DP2KBP3A Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, sehingga belum mampu memberikan gambaran

yang utuh mengenai kontribusi instansi lain dalam upaya penurunan *stunting* secara lebih luas. Kedua, pendekatan kualitatif yang digunakan memberikan pemahaman mendalam, namun tidak memberikan data kuantitatif mengenai efektivitas atau dampak langsung dari program-program yang dijalankan terhadap penurunan angka *stunting*. Ketiga, waktu dan cakupan wawancara yang terbatas menyebabkan kemungkinan adanya informasi penting yang belum tergalai secara menyeluruh, khususnya dari kelompok sasaran seperti ibu hamil, ibu balita, atau tokoh masyarakat yang tidak menjadi informan utama.

Arah Masa Depan Penelitian dapat diarahkan pada beberapa hal. Pertama, penelitian selanjutnya dapat memperluas fokus dengan melibatkan lebih banyak organisasi perangkat daerah dan pemangku kepentingan lintas sektor untuk memahami kolaborasi secara komprehensif. Kedua, penggunaan metode campuran (*mixed methods*) akan sangat bermanfaat untuk menggabungkan kekuatan data kualitatif dan kuantitatif dalam mengevaluasi dampak program secara lebih terukur. Ketiga, penting dilakukan studi longitudinal untuk melihat perubahan perilaku masyarakat dan penurunan prevalensi *stunting* dalam jangka waktu yang lebih panjang. Terakhir, penelitian mendatang juga dapat mengeksplorasi peran budaya lokal, gender, dan sosial ekonomi dalam mendukung atau menghambat efektivitas program penanggulangan *stunting* di daerah.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan dan bantuan dalam penyusunan karya ini. Terima kasih penulis sampaikan kepada Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, serta para informan yang telah bersedia meluangkan waktu untuk memberikan data dan informasi yang sangat berharga. Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada dosen pembimbing, para pengajar, dan seluruh civitas akademika Institut Pemerintahan Dalam Negeri atas bimbingan, motivasi, dan ilmu yang telah diberikan selama proses pelaksanaan penelitian ini. Tak lupa, penulis menghargai segala bentuk dukungan dari keluarga, rekan praja, serta pihak lain yang tidak dapat disebutkan satu per satu, yang telah memberikan semangat dan kontribusi secara langsung maupun tidak langsung hingga penelitian ini dapat terselesaikan dengan baik.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Achmad, M., & Tjenreng, M. B. Z. 2024. Administrasi Pemerintahan Daerah. <http://eprints2.ipdn.ac.id/id/eprint/1457/1/Administrasi%20Pemerintahan%20Daerah%2015%20X%2022%20prof%20Mansyur.pdf>
- Anggraini, Yamin, A., & Dewi, G. 2024. Implementasi Kebijakan dan Program Percepatan Penurunan *Stunting* Pada Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dp2kbp3a) Kabupaten Sumbawa. Prosiding Seminar Nasional Manajemen Inovasi, 8(002), 139–149. <https://conference.uts.ac.id/index.php/SEMAI/article/view/1324>
- BPS. 2023. Laju Pertumbuhan Penduduk - Tabel Statistik. Diakses pada 12 Oktober 2024, dari <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTk3NiMy/laju-pertumbuhan-penduduk.html>
- BPS. 2023. Laporan Indeks Khusus Penanganan *Stunting* 2021-2022.

- <https://www.bps.go.id/id/publication/2023/12/19/37ee0674d0e89152b2425e9f/laporan-indeks-khusus-penanganan-stunting-2021-2022.html>
- Fitri, R., Huljannah, N., & Rochmah, T. N. 2022. Program Pencegahan *Stunting* Di Indonesia: A Systematic Review. *Media Gizi Indonesia (National Nutrition Journal)*, 17(3), 281–292. <https://doi.org/10.204736/mgi.v17i3.281-292>
- Hutasoit, I. 2017. *Pengantar Ilmu Kependudukan*. Bandung: Alfabeta. <http://eprints2.ipdn.ac.id/id/eprint/934>
- Jumino, T. K., & Sartika, I. (2025). Implementation Of The *Stunting* Prevention Policy As One Of Themes Of Government Science Study: A Bibliometric Review. *Syntax Idea*, 7(1), 61-71. <https://doi.org/10.46799/syntax-idea.v7i1.12147>
- Kemendes. 2022. BUKU SAKU Hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2022. <https://repository.badankebijakan.kemkes.go.id/id/eprint/4855>
- Kemendes. 2023. Kesehatan Jadi Upaya Transformatif Menuju Indonesia Emas 2045. Diakses pada 3 November 2024, dari <https://sehatnegeriku.kemkes.go.id/baca/rilismedia/20230616/2243273/kesehatan-jadi-upaya-transformatif-menuju-indonesia-emas-2045/>
- Nasution, M. A. 2023. Kinerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Dalam Penekanan Angka *Stunting* di Kabupaten Asahan Provinsi Sumatera Utara. (Skripsi, Fakultas Perlindungan Masyarakat, Institut Pemerintahan Dalam Negeri). <http://eprints.ipdn.ac.id/id/eprint/12375>
- Pebriandi, Fatriansyah, A., Rizka, D., Nur Indahsari, L., & Oktari Yulanda, N. 2023. Sosialisasi Pencegahan *Stunting* pada Masyarakat Desa Simandolak Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi. *ARRUS Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(2), 2964–1195. <https://doi.org/10.35877/454RI.abdiku2153>
- Rahmadhita, K. 2020. Permasalahan *Stunting* dan Pencegahannya. *Jurnal Ilmiah Kesehatan Sandi Husada*, 11(1), 225–229. <https://doi.org/10.35816/jiskh.v10i2.253>
- Salmo, H. S., Moninjta, D. K., & Kumayas, N. 2022. Strategi Pemerintah Dalam Mengatasi *Stunting* Di Kabupaten Kepulauan Sangihe (Studi Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Sangihe). *Jurnal Governance* 1(2). <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/governance/article/view/42186/37323>
- Supariasa, I. D. N., & Purwaningsih, H. 2019. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kejadian *Stunting* Pada Balita Di Kabupaten Malang. *KARTA RAHARJA* 1(2), 55 – 64 <http://ejurnal.malangkab.go.id/index.php/kr>
- Unicef (2024). Child Protection Keeping children safe from violence, neglect and exploitation. Diakses pada 3 Desember 2024, dari <https://www.unicef.org/indonesia/id/child-protection>
- WHO (2019). Protecting the Rights of the Child to Health. Diakses pada 3 Desember 2024, dari https://www.who.int/health-topics/child-health#tab=tab_